

Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Infrastruktur Desa Wisata Berbasis Partisipatif Masyarakat Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang

Tri Yansyah¹, Ali Zaenal Abidin², Hadi Supratikta³

Universitas Pamulang

Email : Triyansyahrianss@gmail.com, Alizaenalabidin@gmail.com, Supratikta@gmail.com

ARTICLES INFORMATION



JURNAL ILMIAH MANAJEMEN FORKAMMA

Vol.9, No.1, November 2025

Halaman : 25 - 32

ISSN (online) : 2599-171X

ISSN (print) : 2598-9545

Keyword :

**Pemerintah Daerah; Infrastruktur;
Desa Wisata**

JEL. classification : M31

Permalink:

DOI: 10.32493/frkm.v9i1.52510

Article info :

Received : Agustus 2025

Revised : Oktober 2025

Accepted : November 2025

Licenses :



<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Contact Author :

© LPPM & PRODI MM UNPAM

JL.Surya Kencana No.1 Pamulang Tangerang

Selatan – Banten

Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491

e-mail : forkamma@unpam.ac.id

ABSTRACT

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan dan mengembangkan Desa Wisata di Kampung Melayu Barat melalui infrastruktur, untuk menganalisis dan mendeskripsikan keterlibatan masyarakat lokal dan sekitar bersama pemerintah dalam meningkatkan serta mengembangkan Desa Wisata di Kampung Melayu Barat, untuk menganalisis dan mendeskripsikan dampak dan strategi peningkatan infrastruktur Desa Wisata Kampung Melayu Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan hasil penelitian, peran pemerintah daerah telah memainkan peran penting dalam meningkatkan dan mengembangkan Desa Wisata di Kampung Melayu Barat melalui infrastruktur, meningkatkan dan mengembangkan Desa Wisata, masyarakat setempat dilibatkan melalui perwakilan warganya, Desa Wisata Kampung Melayu Barat ini sangat berdampak Positif bagi masyarakat lokal dan sekitarnya.

Abstract. The objective of this study is to analyze and describe the role of the local government in enhancing and developing the Tourism Village in Kampung Melayu Barat through infrastructure. It also aims to analyze and describe the involvement of the local community and the surrounding areas in collaboration with the government to improve and develop the Tourism Village in Kampung Melayu Barat, as well as to analyze and describe the impact of infrastructure improvements on the Tourism Village of Kampung Melayu Barat. The research method used in this study is qualitative deskriptif. Data collection techniques using observation, interview, and documentation. Data analysis methods using SWOT analysis. According to the research findings, the local government has played a significant role in improving and developing the Tourism Village in Kampung Melayu Barat through infrastructure. The local community has been engaged through representatives such as local neighborhood leaders. The Tourism Village of Kampung Melayu Barat has a markedly positive impact on the local community and its surroundings.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang terkenal akan kekayaan alam serta budayanya. Sebagai negara yang terdiri dari banyak pulau dengan keindahan alam dan keragaman budaya, Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Namun, untuk dapat memanfaatkan potensi ini secara maksimal, diperlukan infrastruktur yang memadai, terutama di kawasan yang masih berkembang. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peranan penting, terutama dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Desa Kampung Melayu Barat terletak di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, Desa ini memiliki keindahan alam berupa persawahan dan kekayaan budaya lokalnya, memiliki potensi yang besar untuk dijadikan tujuan wisata. Desa Kampung Melayu Barat memiliki objek wisata alam berupa persawahan, objek tersebut dinamakan Desa Wisata. Dalam penerapannya, pengembangan desa wisata dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap prosesnya. Konsep ini mengedepankan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, warga diberi kesempatan untuk berbagi ide dan pandangan mengenai potensi wisata yang ada, seperti keindahan alam dan tradisi budaya lokal. Dengan kata lain, setiap langkah dalam pengembangan desa wisata direncanakan secara kolaboratif.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Banten Tahun 2018 merupakan dokumen Kerangka strategis yang mendasari pengembangan sektor kepariwisataan di tingkat provinsi. Regulasi ini berfungsi sebagai acuan utama yang menetapkan visi, misi, serta prioritas pembangunan kepariwisataan secara menyeluruh dan berkelanjutan di wilayah Banten. Dalam dokumen ini, ditegaskan bahwa pengembangan destinasi wisata harus dilakukan secara terpadu dan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya, serta peningkatan kualitas layanan. Selain itu, rencana induk ini juga menyoroti pentingnya promosi dan inovasi dalam pengembangan destinasi wisata agar mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Dengan adanya aturan ini, seluruh daerah di Banten diharapkan dapat menyusun program pembangunan kepariwisataan yang selaras dan mendukung visi besar provinsi.

Di tingkat kabupaten, khususnya Kabupaten Tangerang, diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Peraturan ini berfungsi sebagai landasan hukum yang memberikan pedoman dalam pengelolaan kepariwisataan di tingkat lokal, termasuk pengembangan desa wisata. Regulasi ini menegaskan bahwa desa wisata merupakan bagian penting dari strategi pengembangan kepariwisataan daerah dan harus dikembangkan secara profesional, berdaya saing, serta mampu memberdayakan masyarakat setempat. Selain itu, peraturan ini juga mengatur aspek pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, peningkatan fasilitas, serta promosi destinasi secara efektif agar desa wisata dapat menarik kunjungan dan memberikan manfaat ekonomi bagi warga desa.

Keterkaitan antara kedua regulasi ini cukup erat dan saling melengkapi. Perda provinsi memberikan gambaran umum serta arah strategis yang harus diikuti oleh seluruh kabupaten, termasuk Kabupaten Tangerang. Sementara itu, Perda kabupaten lebih berfokus pada penerapan dan pelaksanaan di tingkat lapangan, termasuk pengembangan desa wisata. Dengan adanya kedua peraturan ini, pemerintah desa memiliki dasar hukum yang kuat dan pedoman yang jelas dalam merancang serta melaksanakan program pengembangan desa wisata secara terpadu dan berkelanjutan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan potensi desa, memperkuat budaya lokal, serta mendukung perekonomian masyarakat melalui pengembangan destinasi wisata yang inovatif dan berdaya saing.

Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa, menjabarkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum dengan Batasan wilayah dan memiliki wewenang untuk mengoordinasikan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut juga mengatur

pemerintah desa, keuangan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan badan usaha milik desa (BUMDes).

Pemerintah desa berperan sebagai pengelola dan penyelenggara layanan publik di tingkat daerah, yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Dalam konteks pembangunan, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program-program yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan jalan akses, fasilitas publik, dan sarana pendukung wisata lainnya sangat diperlukan untuk menarik lebih banyak pengunjung.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur wisata sangat penting, mengingat masyarakat adalah pihak yang paling memahami kebutuhan dan potensi wilayah mereka. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah bisa merancang program yang lebih tepat sasaran, serta meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap proyek-proyek atau program-program yang dijalankan. Selain itu, partisipasi masyarakat berpotensi untuk meningkatkan kualitas layanan wisata, karena mereka bisa memberikan informasi dan pengalaman dalam bentuk aspirasi. Dalam perspektif ini, tanggung jawab pemerintah tidak hanya sebatas membangun fisik, namun juga mencakup pengembangan yang melibatkan masyarakat setempat. Dalam hal ini, selaras dengan pernyataan Bahua (2018:15) bahwa pemerintah perlu memposisikan rakyat sebagai pelaku pembangunan, bukan sekedar sebagai objek pembangunan. Dengan kata lain, Pembangunan masyarakat akan berhasil, jika peran masyarakat dan pemerintah sangat jelas sebagai subyek dan obyek dari pembangunan.

Adapun fokus masalah: Apa saja peran pemerintah daerah dalam meningkatkan dan mengembangkan Desa Wisata di Kampung Melayu Barat Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang melalui infrastruktur?

Bagaimana keterlibatan masyarakat lokal dan sekitar bersama pemerintah daerah dalam meningkatkan serta mengembangkan Desa Wisata di Kampung Melayu Barat Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang?

Bagaimana dampak dan strategi peningkatan infrastruktur Desa wisata Kampung Melayu Barat Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang?

Dan tujuan penelitian : untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan dan mengembangkan Desa Wisata di Kampung Melayu Barat Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang melalui infrastruktur.

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan keterlibatan masyarakat lokal dan sekitar bersama pemerintah daerah dalam meningkatkan serta mengembangkan Desa Wisata di Kampung Melayu Barat Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang.

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan dampak serta strategi peningkatan infrastruktur Desa Wisata Kampung Melayu Barat Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang.

B. KAJIAN LITERATUR

Menurut Ria Retno (2020:1) "Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui serangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya".

Menurut Sigit, dkk (2024:1) "Manajemen SDM adalah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan, atau pegawai serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi perusahaan".

Menurut Hikmat dalam Hamid Hendrawati (2018:84) "Manajemen perencanaan partisipatif merupakan konsekuensi logis dari adanya implementasi pemberdayaan masyarakat".

Menurut Hikmat dalam Hamid Hendrawati (2018:84) "Manajemen perencanaan partisipatif merupakan konsekuensi logis dari adanya implementasi pemberdayaan masyarakat".

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wisata Kampung Melayu Barat, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, selama periode November hingga Desember 2024. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, bertujuan untuk memahami makna dan persepsi terkait peran pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata melalui penguatan infrastruktur. Desain penelitian meliputi teknik pengumpulan data berupa observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan metode SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Lokal dalam Meningkatkan dan Mengembangkan Desa Wisata di Kampung Melayu Barat Melalui Infrastruktur

Pemerintah desa sangat berperan dalam pengembangan Desa Wisata melalui pembangunan infrastruktur yang didukung oleh anggaran dari APBD kabupaten, provinsi, dan pusat. Kepala desa menegaskan bahwa perencanaan jangka menengah dan pelaksanaan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan berkelanjutan, dengan fokus pada perbaikan jalan, selokan, dan fasilitas umum lainnya. Keberhasilan pembangunan diukur dari keberlanjutan dan dampaknya terhadap masyarakat, seperti meningkatnya tenaga kerja dan penurunan angka stunting. Pengembangan infrastruktur turut meningkatkan jumlah pengunjung dan pendapatan masyarakat setempat.

Keterlibatan Masyarakat Lokal dan Sekitar dalam Pengembangan Desa Wisata

Masyarakat dilibatkan aktif melalui musyawarah desa dan peran serta langsung dalam pembangunan dan pengelolaan desa wisata, termasuk dalam kegiatan kebersihan dan pengelolaan lahan. Perwakilan masyarakat turut berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta secara sukarela membantu dalam pembangunan infrastruktur. Keterlibatan ini memperkuat rasa memiliki dan mendukung keberhasilan pengembangan desa wisata, serta meningkatkan semangat gotong royong dan pemberdayaan masyarakat.

Dampak Peningkatan Infrastruktur Desa Wisata Kampung Melayu Barat

Peningkatan infrastruktur berdampak positif terhadap ekonomi lokal, terlihat dari munculnya UMKM yang meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja baru. Keberhasilan ini tercermin dari penurunan angka pengangguran dan meningkatnya kunjungan wisatawan. Masyarakat berharap agar pembangunan terus melibatkan mereka secara aktif agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara maksimal, dan area desa wisata digunakan untuk kegiatan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti berkebun dan tempat memancing yang juga membantu menurunkan angka stunting.

Pembahasan

Analisis Peran Pemerintah Lokal dalam Meningkatkan dan Mengembangkan Desa Wisata di Kampung Melayu Barat melalui Infrastruktur

Peran strategis pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata Kampung Melayu Barat. Pemerintah desa melalui kebijakan yang sejalan dengan kebijakan nasional telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan potensi desa, termasuk edukasi masyarakat terkait pengelolaan desa wisata dan pemanfaatan lahan pertanian sebagai sektor pendukung pariwisata. Desa yang memiliki lahan pertanian seluas sekitar 20 hektar serta tanaman hortikultura mendapat perhatian dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas parkir, dan fasilitas umum lainnya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan. Pemerintah desa juga fokus memperbaiki infrastruktur pertanian dengan menyediakan sistem irigasi dan akses jalan menuju lahan, serta mengembangkan atraksi wisata berbasis budaya dan alam, seperti festival panen dan pasar desa. Pengembangan ini

didukung oleh perencanaan jangka menengah yang dituangkan dalam RPJMDS, dan pendanaan diperoleh dari sumber seperti Dana Desa, APBD, dan APBN. Keberlanjutan pembangunan diukur melalui monitoring dan evaluasi berkala, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas. Dampak positif dari berbagai program ini mencakup peningkatan lapangan pekerjaan, pengurangan pengangguran, dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat, sekaligus membantu mengatasi masalah kesehatan seperti stunting. Meski demikian, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan anggaran dan kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan profesional. Kesimpulannya, pemerintah desa telah memainkan peran penting dalam merancang kebijakan, menyediakan infrastruktur, dan memberdayakan masyarakat, sehingga desa wisata ini berpotensi besar berkembang sebagai destinasi yang berkelanjutan dan menguntungkan secara ekonomi dan sosial.

Analisis Keterlibatan Masyarakat Lokal dan Sekitar Bersama Pemerintah Lokal dalam Meningkatkan dan Mengembangkan Desa Wisata di Kampung Melayu Barat

Masyarakat memiliki peran utama sejak tahap perencanaan melalui musyawarah desa yang melibatkan mereka sebagai sumber aspirasi dan pengambil keputusan. Partisipasi aktif masyarakat termasuk dalam pelaksanaan kegiatan seperti kebersihan, pemeliharaan fasilitas, dan pengelolaan area wisata secara sukarela. Pemerintah desa secara rutin menyelenggarakan forum diskusi dan evaluasi yang melibatkan masyarakat untuk mengidentifikasi hambatan dan solusi bersama. Edukasi dan sosialisasi tentang manfaat desa wisata, seperti penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan, memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap kelestarian desa. Mereka juga dilibatkan dalam pengelolaan usaha berbasis wisata seperti homestay, kuliner, dan kerajinan tangan yang menjadi produk unggulan desa. Kolaborasi ini memperkuat keberhasilan pengembangan desa wisata, yang tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga mengandalkan peran aktif masyarakat sebagai pelaku utama. Pendekatan inklusif melalui musyawarah desa dan pemberdayaan kapasitas masyarakat melalui pelatihan meningkatkan kualitas pengelolaan dan keberlanjutan desa wisata. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat memperkuat sense of ownership dan menjaga kelestarian budaya serta lingkungan desa, sehingga mampu menciptakan desa wisata yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Analisis Dampak & Strategi Peningkatan Infrastruktur Desa Wisata Kampung Melayu Barat

Dampak positif dari pembangunan infrastruktur terhadap keberhasilan desa wisata. Peningkatan fasilitas seperti jalan, tempat parkir, dan fasilitas umum lainnya telah meningkatkan akses dan kenyamanan wisatawan, yang berdampak langsung pada peningkatan jumlah kunjungan dan perekonomian lokal melalui munculnya UMKM seperti warung makanan, kerajinan, dan penyewaan perlengkapan wisata. Menurut wawancara, pendapatan masyarakat meningkat, dan penurunan angka pengangguran menjadi indikator keberhasilan pembangunan infrastruktur. Selain aspek ekonomi, pembangunan infrastruktur juga mendukung aspek kesehatan dan kesejahteraan sosial, misalnya melalui pemanfaatan lahan berkebun dan perikanan yang meningkatkan konsumsi bahan pangan bergizi dan menurunkan angka stunting. Masyarakat berharap pembangunan berkelanjutan dan dilanjutkan dengan pemberdayaan kapasitas melalui pelatihan kewirausahaan dan pengembangan akses pasar agar produk lokal semakin kompetitif. Fasilitas lain yang diharapkan meliputi pusat informasi wisata, area istirahat, serta fasilitas budaya dan edukatif. Infrastruktur yang memadai tidak hanya meningkatkan ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan keberlanjutan lingkungan desa. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk menjaga momentum pertumbuhan desa wisata dan memastikan manfaatnya dirasakan secara merata serta berkelanjutan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peran pemerintah daerah telah memainkan peran penting dalam meningkatkan dan mengembangkan Desa Wisata di Kampung Melayu Barat melalui infrastruktur. Pemerintah daerah telah mengalokasikan dana untuk membangun dan menyediakan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, dan fasilitas umum lainnya. Pengembangan infrastruktur ini telah berkontribusi pada peningkatan kunjungan wisatawan ke desa.

Meningkatkan dan mengembangkan Desa Wisata, masyarakat setempat dilibatkan melalui perwakilanarganya. Dalam hal ini, terlihat bahwa masyarakat sekitar sangat antusias bersama pemerintah setempat dalam meningkatkan dan mengembangkan Desa Wisata.

Desa Wisata ini memiliki potensi besar untuk berkembang dengan memanfaatkan keunggulan internal dan peluang eksternal, seperti pengembangan agrowisata dan pasar pariwisata yang sedang berkembang. Manfaat dari pengembangan tersebut meliputi peningkatan perekonomian dan penurunan angka pengangguran. Selain itu, dengan memanfaatkan sebagian area desa sebagai lahan berkebun dan tempat memancing, diharapkan dapat membantu menurunkan tingkat stunting masyarakat sekitar, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan warga secara keseluruhan.

Saran

Agar peran pemerintah daerah dalam pengembangan infrastruktur Desa Wisata di Kampung Melayu Barat semakin optimal, disarankan agar pemerintah terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap infrastruktur yang telah dibangun. Selain itu, diperlukan pengawasan rutin untuk memastikan bahwa infrastruktur seperti jalan, fasilitas umum, dan sarana pendukung lainnya tetap dalam kondisi baik dan layak digunakan oleh wisatawan maupun masyarakat setempat. Pemerintah juga disarankan untuk memperluas cakupan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan serta berbasis pada kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi dengan pihak swasta atau investor potensial dapat menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya tarik wisata desa.

Agar keterlibatan masyarakat lokal semakin meningkat dan merata, disarankan agar pemerintah daerah memperluas partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan Desa Wisata, tidak hanya terbatas pada perwakilan RT dan RW. Pemerintah dapat membentuk forum atau kelompok kerja yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti kelompok pemuda, perempuan, dan pelaku UMKM lokal, sehingga ide dan aspirasi mereka dapat tersalurkan dengan baik. Program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, seperti pemandu wisata, kerajinan tangan, dan pengelolaan homestay, juga perlu diperkuat agar masyarakat dapat lebih aktif berkontribusi dalam pengembangan desa wisata. Selain itu, promosi budaya lokal sebagai daya tarik utama juga perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan seni dan budaya yang dapat meningkatkan kesadaran dan kebanggaan mereka terhadap potensi desa wisata.

Untuk memaksimalkan dampak positif dari peningkatan infrastruktur di Desa Wisata Kampung Melayu Barat, disarankan agar pengelola dan pihak terkait meningkatkan pengembangan berbagai inovasi serta strategi yang dapat memperkuat keunggulan internal desa, seperti pengembangan agrowisata dan promosi pasar pariwisata yang sedang berkembang. Selain itu, perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan agar mereka mampu memanfaatkan lahan untuk berkebun dan area memancing secara optimal. Dengan langkah tersebut, diharapkan perekonomian desa dapat meningkat dan tingkat pengangguran berkurang secara signifikan. Lebih jauh lagi, upaya yang mendukung pola hidup sehat dan gizi seimbang, seperti pengelolaan lahan berkebun dan fasilitas memancing, perlu diperkuat guna membantu menurunkan angka stunting di masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan warga secara menyeluruh, sehingga Desa Wisata ini dapat menjadi contoh pengembangan desa berbasis potensi dan keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariffudin, dkk. (2023). Pengantar Manajemen Kosenp dan Aplikasi. Purbalingga : Eureka Media Aksara.
- Ari Prasetyo. (2020). Pengantar Manajemen Islami. Surabaya : Airlangga University Press.
- Bahua, M. I. (2018). Perencanaan Partisipasif Pembangunan Masyarakat. Gorontalo : Ideas Publishing.
- Damayanti, Y & Mulyono, S.E.. (2024). Partisipasif Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Jatirejo Kota Semarang. Jurnal of Human and Education. DOI : 10.31004/jh.v4i4.1328
- Fachrurazi, dkk (2024). Pengantar Manajemen. Cendekia Mulia Mandiri Febriandhika, I & Kurniawan, T. (2020). Pengembangan Pariwisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dilihat Dari Perspektif Implementasi Kebijakan. Jurnal Pariwisata Pesona. Doi: <https://doi.org/10.26905/jpp/v5i1.2793>
- Frasawi, E. S. & Citra, P. A.. (2018). Partisipasif Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Ambengan Kecamatan Sukasa. Jurnal Pendidikan Geografis Undiksha. DOI : 10.23887/jjpg.v6i3.20704
- Guruh, D. P. (2021). Teori Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Cipta Media Nusantara.
- Habibi, M. M.. (2022). Sinergi Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- Hamis, H. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Makassar : De La Macca.
- Herdiana, D. (2019). Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. Jurnal Master Pariwisata. DOI : 10.24843/JUMPA.2019.v06.i01.p04
- Indayani. (2018). Pengantar Manajemen. Sidoarjo : Umsida Press.
- Kusen, dkk. (2023). Kolaborasi Pengembangan Pariwisata Desa Sawarna. Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik. DOI : 10.30656/jdkp.v4i2.6569
- Legionosuko L, dkk. (2020). Analisis Adaptif Dinamisasi Metode Analisis SWOT. Bogor : Universitas Petahanan.
- Mahadiansar & Sentanu. (2020). Memperkuat Peran Pemerintah Daerah : Mengelola Pariwisata Lokal Yang Berkelanjutan. Jurnal Ilmu Adminstrasi Negara. DOI : <https://doi.org/10.31629/juan/.v8il.1879>
- Mulyadi & Winarso, W. (2020). Pengantar Manajemen. Banyumas : CV. Pena Persada.
- Novia, dkk (2021). Manajemen Sumber daya Manusia, Manusia, data dan analisa. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Nugroho, R & Supranto. (2024). Membangun Desa Wisata Bagian 1: Pengelolaan Desa Wisata. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Oktaviari, K. F. & Gustaman, F. A.. (2024). Eksistensi Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Objek Wisata Girpasang , Klaten, Jawa Tengah. Jurnal Ilmiah Kepariwisata. DOI : 10.47256/kji.v18i2.5013
- Pahleviannur, M. R., dkk. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Sukoharjo : Pradina Pustaka.
- Raihan. (2017). Metodologi Penelitian. Jakarta : Universitas Islam Jakarta.

- Ria Retno. (2020). Dasar-Dasar Manajemen. Bandung : Widina Bhakti Persada Roni, A. A.
(2020). Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi. Malang : Meigga Letucia
- Sabrina. (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia. Medan : Umsu Press.
- Santafanny, Farah.F.A., & dkk. (2021). Partisipasif Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Lokal. Jurnal Riset dan Konseptual. DOI : 10.28926/brilliant.v6i4.689
- Satriadi, dkk (2022). Pengantar Manajemen. Pasaman Barat: CV Azka Pustaka. Simon, S. H..
(2022). Partisipasi dan Pemberdayaan Di Sektor Publik. Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Sigit, dkk (2024). Manajemen Sumber Daya Manusia. Gorontalo: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Wiswata, G. N. A., dkk. (2018). Analisis SWOT. Denpasar : Universitas Mahasaraswati Press.
- Zahera, M. U. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep dasar dan Teori. Jakarta : UNJ Press.
- Smesta, L. B., & dkk. (2025). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata Nagrog, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Manajemen Pariwisata dan Perhotelan.